



News Title : Bappebti Blokir 1.855 Situs Internet Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal di 2023	
Media Name : hukumonline.com	Journalist : Fitri Novia Heriani
Publish Date : 06 February 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Berita	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Beranda > Berita > Terbaru > Bappebti Blokir 1.855...
Terbaru 6 Februari 2024

Bappebti Blokir 1.855 Situs Internet Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal di 2023

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif.

Oleh: Fitri Novia Heriani Bacaan 3 Menit



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sepanjang tahun 2023 memblokir 1.855 situs web Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal. Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (*smartphone*). Masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan, Kamis (01/2/2024).

- Baca juga:**
- Lindungi Nasabah, Bappebti Selesaikan Aduan Secara Berjenjang
 - Bappebti Ingatkan Masyarakat Waspada Kegiatan PBK Ilegal

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian akibat PBK ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melapor ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran PBK ilegal. Pelaporan bisa dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan disiset secara mendalam.
Hanya Rp42.000/bulan
Berlangganan Sekarang >

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," jelas Kasan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menegaskan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," kata Aldison tegas.

Situs web PBK ilegal yang telah diblokir Bappebti dapat dinormalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beriktikad baik mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal. Selain itu, ini juga cara membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

Aldison menambahkan, "Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan <https://ceklegalitas.bappebti.go.id/>".

Terkait penanganan aduan masyarakat, Kasan mengungkapkan pihaknya menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan tentang PBK.

Prosedur yang dimaksud mengacu ketentuan Pasal 61 **UU No.32 Tahun 1997** jo. **UU No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi** (UU PBK). Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 **Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan**.

"Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif," kata Kasan menjelaskan.

Kasan menambahkan—terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti—disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) menjadi pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain penguatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating pialang berjangka.

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama dilakukan antara lain dengan Kejaksaan Agung. Bappebti juga merupakan anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).